



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2013

**DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
PROVINSI JAWA TIMUR
2012**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan tugas pembangunan di Propinsi Jawa Timur, khususnya mekanisme dan pelaksanaan system perencanaan pembangunan yang akuntabel di jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka bersama ini Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur membuat dokumen Rencana Kerja yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Tahun 2013.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat beberapa informasi penting berkaitan dengan hasil pelaksanaan pembangunan di bidang perikanan dan kelautan tahun 2011, serta informasi lain tentang masalah-masalah yang dihadapi, sekaligus upaya-upaya dalam mengatasi masalah yang dalam hal ini diwujudkan melalui penetapan kebijakan, program, dan strategi yang akan dilakukan pada tahun 2013.

Semoga upaya kita sekalian dapat membawa manfaat dan hasil yang lebih baik dalam menunjang pembangunan Propinsi Jawa Timur.

Surabaya, Maret 2012
**KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

Ir. KARDANI MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19541113 198103 1 012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Skpd	10
BAB. III. TUJUAN, STRATEGI DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2013..	15
3.1. Tujuan	15
3.2. Strategi Pembangunan.....	15
3.3. Indikator Kinerja Utama Tahun 2013	16
3.4. Program/Kegiatan Tahun 2013	17
BAB. V PENUTUP.....	21
LAMPIRAN MATRIKS RENJA TAHUN 2013	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD.

Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur tahun 2013 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014 yang telah disesuaikan dengan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2011.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2013 ini menyusun Rencana Kerja tahun 2013. Renja SKPD merupakan

dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur tahun 2013, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur tahun 2010 – 2014 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2014 yaitu : **“Jawa Timur penghasil produk perikanan dan kelautan yang aman dan lestari tahun 2015”**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, misinya adalah **“Mewujudkan masyarakat perikanan dan kelautan yang sejahtera melalui pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan”**.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2013 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 adalah :

- a. Undang–Undang Nomor 1 tahun 1992, tentang Pembentukan Kota Denpasar;
- b. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;

- c. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan tahun 2013 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2013.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Acuan pelaksanaan target kinerja tahun 2013 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan perikanan dan kelautan di Jawa Timur selama tahun 2013.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD,

berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional,** telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD,** perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan,** berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur selama tahun 2011 dan perkiraan target tahun 2012. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

C. Evaluasi Program Tahun 2011

Total Anggaran Tahun 2011 Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 233.191.564.756,- untuk mendukung 10 program. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp . 213.191.564.756,- atau 91,45%. Sisa anggaran yang tidak terserap tersebut dikarenakan adanya sisa Penawaran Kontrak dan Kegiatan DAK Provinsi berupa pengadaan kapal yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya sanggah banding.

Jika dilihat dari Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, hasil pencapaiannya adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN	Target	Capaian	%
1.	Jumlah kelompok usaha masyarakat perikanan dan kelautan (kelompok)	1.614	3.980	246,59
2.	Produksi Perikanan			
	❖ Perikanan Budidaya (ton)	484.037	836.851	172,89
	❖ Perikanan Tangkap (ton)	358.305,2	404.716,60	112,95
	❖ Garam (ton)	864.760	629.216,08	72,76
3.	Ekspor :			
	❖ Nilai (Juta US\$)	685,41	827,00	120,65
4.	Konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	19,10	20,20	105,76
5.	- NTN	110	148,46	134,9
	- NTPi	103	101,54	98,58
6.	Pelestarian SDI			
	a. Rehabilitasi Mangrove (Ha)	268	267,5	99,81
	b. Rehabilitasi Terumbu Karang (Ha)	110	110	100
	c. Restocking (ekor)	9.795.500	9.819.500	100,24

Dalam pelaksanaan pembangunan perikanan dan kelautan masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu :

- 1) Kualitas dan kuantitas benih dan induk menurun, utamanya yang bernilai ekonomis tinggi;

- 2) Harga pakan pabrikan tinggi sehingga menyebabkan biaya produksi tinggi;
- 3) Terjadinya penurunan produksi hasil tangkapan;
- 4) Kualitas hasil tangkapan nelayan masih rendah;
- 5) Masih ada sarana dan prasarana pelabuhan yang belum dapat dioperasikan secara optimal karena belum sempurna;
- 6) Kualitas dan kuantitas bahan baku belum sesuai standar;
- 7) Penanganan mutu komoditas ekspor dengan *Cold Chain System (CCS)* belum optimal;
- 8) Produktivitas dan kualitas produk garam rendah;
- 9) Masih sering terjadi pengrusakan wilayah pesisir dan sumber daya ikan oleh masyarakat.

D. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2012

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp. **246.442.828.000,-** terurai dalam **9** program, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2011, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Hal ini terkait juga dengan target pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2012, yaitu sebagai berikut :

NO.	URAIAN	Capaian Th. 2011	Target Th. 2012	Perkiraan Capaian Th. 2012
1.	Jumlah kelompok usaha masyarakat perikanan dan kelautan (kelompok)	3.980	4.180	4.180
2.	Produksi Perikanan <ul style="list-style-type: none"> ❖ Perikanan Budidaya (ton) ❖ Perikanan Tangkap (ton) ❖ Garam (ton) 	836.851 404.716,60 689.250,66	836.851 404.716,6 750.000	836.851 404.716,6 750.000
3.	Ekspor : <ul style="list-style-type: none"> ❖ Nilai (Juta US\$) 	827,00	909	909
4.	Konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	20,20	21,2	21,2
5.	Nilai Tukar Nelayan/pembudidaya ikan	148,46 101,54	108	148,46 101,54
6.	Pelestarian SDI <ul style="list-style-type: none"> d. Rehabilitasi Mangrove (Ha) e. Rehabilitasi Terumbu Karang (Ha) f. Restocking (ekor) 	267,5 110 9.819.500	390 130 7.100.000	390 130 9.819.500

Untuk mencapai target tersebut, maka strategi yang diterapkan adalah:

- Peningkatan SDM Perikanan dan Kelautan
- Penerapan teknologi dibidang perikanan dan kelautan

- Fasilitasi sarana dan prasarana budidaya, penangkapan dan pengolahan hasil perikanan.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, secara On-Farm dan Off-Farm secara garis besar adalah sebagai berikut:

a. untuk kegiatan On Farm antara lain meliputi:

- Pemberian alat bantu penangkapan ikan di 23 Kabupaten/Kota;
- Penyempurnaan sarpras di 8 PPP/PPI (Muncar Banyuwangi, Bulu Tuban, Tamperan Pacitan, Mayangan Kota Probolinggo, Pasongsongan Sumenep, Puger Jember, Pondokdadap Malang dan Paiton Kab. Probolinggo);
- Restrukturisasi armada penangkapan ikan (kapal 30 GT) di 6 lokasi (Tuban, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang);
- Fasilitasi palkanisasi kapal dan penerapan sistem rantai dingin di 9 PP/PPI;
- Fasilitasi Program Pakan Mandiri di 8 lokasi (Ngawi, Magetan, Tuban, Trenggalek, Probolinggo, Bondowoso, Situbondo dan Tulungagung)
- Pengembangan komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi (Kepiting, Kerapu, Gabus, Sidat) di 13 Kabupaten (Jember, Situbondo, Sampang, Sidoarjo, Probolinggo, Sumenep, Nganjuk, Madiun, Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Bojonegoro)
- Pengembangan sistem pemanfaatan lahan budidaya/pekarangan di 38 Kabupaten/Kota (jenis ikannya lele, nila, belut, gurami dll) ;
- Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) (Kegiatannya berupa perbaikan Sarana prasarana tambak, bantuan Ramsol, bantuan ongkos pengelolaan tambak) di 11 lokasi (Tuban, Lamongan, Gresik, Kota Surabaya, Pasuruan, Kota Pasuruan, Probolinggo, Bangkalan, Sampang, Pamekasan , Sumenep)
- Konservasi dan Rehabilitasi Mangrove dan Terumbu Karang di 12 Kabupaten (Banyuwangi, Jember, Probolinggo, Lumajang, Sidoarjo, Wilayah Madura, Blitar, Pacitan)
- Restocking Laut dan Perairan Umum Darat (PUD) di 14 Kabupaten (Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Malang, Mojokerto, Blitar, Pacitan, dan Wilayah Madura).

b. Sedangkan kegiatan Off Farm adalah untuk mendukung pengelolaan hasil produksi perikanan. Baik sejak pasca panen, pengolahan sampai pada pemasaran hasil. Adapun kegiatannya antar lain :

- Diversifikasi produk olahan dengan memberikan bantuan alat pengolahan ikan di 18 Kabupaten/Kota (Banyuwangi, Jember, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Malang, Kota Batu, Bangkalan, Pamekasan, Blitar, Magetan, Kediri, Ngawi).
- Pemberian layanan HC (Health Sertificate) secara Online serta kegiatan-kegiatan bimbingan teknis bagi pelaku usaha di bidang perikanan dan kelautan, dalam rangka menunjang ekspor hasil perikanan.
- Untuk meningkatkan konsumsi ikan di Jawa Timur dilakukan pula kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) di seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, melalui kegiatan sosialisasi manfaat makan ikan bagi balita, anak-anak, ibu hamil dan orang tua.
- FORIKAN (Forum Peningkatan Konsumsi Ikan) yang mana sebagai Ketua Umum ditingkat adalah istri Gubernur Jawa Timur dan diikuti oleh seluruh istri Bupati/Walikota sebagai Ketua Umum di 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur.
- Kegiatan yang telah dilakukan oleh Forikan adalah : promosi makan ikan, diversifikasi olahan hasil perikanan dan lomba masak ikan. Peningkatan konsumsi ikan pada tahun 2009 sebesar 17,8 kg/kap/th meningkat menjadi 20,2 kg/kap/th pada tahun 2011.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

A. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perikanan dan Kelautan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perikanan dan kelautan. Yang mana dalam melaksanakan tugas Dinas Perikanan dan Kelautan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan dan kelautan
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2008 tentang uraian tugas sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Perikanan dan kelautan Provinsi Jawa Timur, maka susunan organisasi dan tugas masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
Mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan dan kelautan

2. Sekretaris
Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan, hubungan masyarakat (humas) dan protokol. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan
 - d. Pengelolaan administrasi perlengkapan
 - e. Pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol
 - f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan
 - g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang
 - h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas
 - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana
 - j. Pelaksanaan proses administrasi rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala DinasSusunan organisasi sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program
 - c. Sub Bagian keuangan
 - d. Sub Bagian Perlengkapan

3. Bidang Perikanan Budidaya
Mempunyai tugas melaksanakan peningkatan dan pengembangan perikanan budidaya, dan mempunyai fungsi :
 - a. Pengembangan Budidaya dan perbenihan
 - b. Pengembangan prasarana dan sarana budidaya dan perbenihan
 - c. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan
 - d. Pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan dibidang perikanan budidaya
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain diberikan oleh Kepala DinasSusunan organisasi Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi
 - b. Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya
 - c. Seksi Kesehatan Ikan Budidaya dan Lingkungan

4. Bidang Perikanan Tangkap
Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan peningkatan dan pengembangan perikanan tangkap dan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap
 - b. Pengembangan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tangkap
 - c. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana perikanan tangkap
 - d. Penerapan teknologi dan penyediaan sarana perikanan tangkap
 - e. Pembinaan dan pengembangan organisasi nelayan
 - f. Pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan dibidang perikanan tangkap
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas
- Susunan organisasi Bidang Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut:
- a. Seksi Eksploitasi dan Teknologi
 - b. Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap
 - c. Seksi Operasional Pelabuhan

5. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan

Mempunyai tugas melaksanakan merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan peningkatan dan pengembangan kelautan pesisir, pulau-pulau kecil dan pengawasan, serta mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil
 - b. Pengembangan pemanfaatan ppotensi sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil
 - c. pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
 - d. Pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan
 - e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
- Susunan organisasi Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan terdiri atas :
- a. Seksi Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian

6. Bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan mempunyai tugas

merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha, pemasaran, permodalan, kelembagaan usaha dan promosi hasil perikanan dan kelautan
- b. Penyebarluasan teknologi pengolahan dan pengendalian mutu hasil perikanan
- c. Pelaksanaan penilaian teknis perijinan usaha perikanan dan kelautan
- d. Pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan dibidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Susunan organisasi Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri atas :
- a. Seksi pengembangan usaha dan pemasaran
 - b. Seksi Bina mutu
 - c. Seksi pelayanan usaha

B. Pelayanan SKPD

1. Sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007, bahwa Urusan Pemerintah terdiri atas urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintahan daerah provinsi mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pilihan sebagaimana dimaksud adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur adalah bertugas untuk menyelenggarakan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Pelayanan Publik di bidang perikanan dan Kelautan, dilakukan dengan :
 - Kaji terap Teknologi Perikanan dan Kelautan
 - Melakukan sosialisasi tentang teknologi perikanan dan kelautan;
 - Pelayanan Fasilitas Prasarana perikanan dan kelautan, yaitu Fasilitas Pelabuhan Perikanan dan Prasarana Budidaya;
 - Pelayanan Fasilitas Usaha;
 - Pelayanan usaha pemanfaatan asset daerah melalui pengujian mutu laboratorium, uji kualitas air, serta jasa usaha yang meliputi penyewaan gedung/bangunan, peralatan serta pejualan benih/bibit, yang telah dilakukan di UPT Laboratorium

pengendalian dan pengujian Mutu Hasil Perikanan (UPT LPPMHP), UPT Pengembangan Penangkapan Ikan (UPT PPI), UPT Pengembangan Budidaya Air Payau (UPT PBAP) Bangil, UPT Pengembangan Budidaya Air Tawar (UPT PBAT) Umbulan, UPT Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPT PPPP) Bawean, Hal ini berdampak pada Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011 sebagai berikut :

Uraian	Target	Realisasi (Rp)	Pencp. (%)
1. Retribusi Jasa Umum	10.816.000	10.816.000,00	100
2. Retribusi Jasa Usaha			
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.388.500.000	13.752.726.793,00	132,38
b. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	875.000.000	876.636.170,00	100,19
3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah			
- Bagi Hasil Dana Bergulir	30.000.000	54.391.627,27	227,55
JUMLAH	11.304.316.000	14.708.444.654,27	130,11

BAB III

TUJUAN, STRATEGI DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2013

3.1. TUJUAN

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.

Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan pembangunan perikanan dan kelautan tahun 2010-2014 adalah :

- a. Meningkatkan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat perikanan dan kelautan;
- b. Meningkatkan ketersediaan dan keamanan pangan dari sektor Perikanan dan Kelautan;
- c. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya Perikanan dan Kelautan yang lestari dan berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Perikanan dan Kelautan;
- e. Mengembangkan integrasi dalam penataan dan pemanfaatan ruang pesisir dan laut.

3.2. STRATEGI PEMBANGUNAN

Untuk mewujudkan visi dan misi yang diemban oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, maka sasaran strategis yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Meningkatnya kemampuan dan fasilitasi usaha masyarakat perikanan dan kelautan;
- b. Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk Perikanan dan Kelautan

- c. Terciptanya Sumberdaya perikanan dan kelautan yang lestari;
- d. Meningkatnya pendapatan masyarakat Perikanan dan Kelautan serta konsumsi ikan perkapita;
- e. Terciptanya pemanfaatan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan.

3.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sedangkan indikator yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2010 – 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya data kelompok usaha masyarakat perikanan dan kelautan;
- b. Tercapainya target produksi;
- c. Tercapainya produk berkualitas sesuai standar mutu dari hulu sampai hilir;
- d. Tercapainya target konsumsi makan ikan;
- e. Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi);
- f. Terlaksananya Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Ikan (SDI).

Adapun target Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN	Target
1.	Jumlah kelompok usaha masyarakat perikanan dan kelautan (kelompok)	4.180
2.	Produksi Perikanan <ul style="list-style-type: none"> ❖ Perikanan Budidaya (ton) ❖ Perikanan Tangkap (ton) ❖ Garam (ton) 	839.851,00 440.768,15 900.000,00
3.	Ekspor : <ul style="list-style-type: none"> ❖ Nilai (Juta US\$) 	1.467
4.	Konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	22,05
5.	Nilai Tukar Nelayan/pembudidaya ikan	110
6.	Pelestarian SDI <ul style="list-style-type: none"> a. Rehabilitasi Mangrove (Ha) b. Rehabilitasi Terumbu Karang (Ha) c. Restocking (ekor) 	445 140 9.000.000

3.4. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur memerlukan anggaran sebesar Rp. 248.775.000.000,- untuk mendukung 10 (sepuluh) program kegiatan Pembangunan Perikanan dan Kelautan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Agroindustri / Agrobisnis
2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4. Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan
5. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
6. Program pengembangan Budidaya Perikanan
7. Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan Tangkap
8. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
9. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan
10. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Selain itu, penjabaran program ke dan kegiatan-kegiatan juga memperhitungkan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Kualitas dan kuantitas benih dan induk menurun, utamanya yang bernilai ekonomis tinggi;
- 2) Harga pakan pabrikan tinggi sehingga menyebabkan biaya produksi tinggi;
- 3) Masih ada sarana dan prasarana pelabuhan yang belum dapat dioperasikan secara optimal karena belum sempurna;
- 4) Kualitas dan kuantitas bahan baku belum sesuai standar;
- 5) Penanganan mutu komoditas ekspor dengan *Cold Chain System (CCS)* belum optimal;
- 6) Masih sering terjadi pengrusakan wilayah pesisir dan sumber daya ikan oleh masyarakat;
- 7) Masih diperlukan optimalisasi sarana dan prasarana bagi POKMASWAS.

Penjabaran Masing-masing Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Agroindustri / Agrobisnis

Program direncanakan mendapat alokasi dana sebesar Rp. 3.000.000.000,- untuk mendukung kegiatan Pengamanan (safeguarding) perikanan;

2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Dukungan dana yang direncanakan sebesar Rp 210.000.000,- digunakan untuk menunjang kegiatan Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur;

3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Anggaran yang direncanakan guna mendukung program tersebut sebesar Rp 17.000.000.000,- yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik;

4. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Program tersebut rencana alokasi anggaran sebesar Rp 18.250.000.000,- dengan rencana kegiatan :

- a. Pendidikan Kemasyarakatan sebesar Rp 3.750.000.000,-
- b. Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- c. Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebesar Rp. 3.000.000.000,-
- d. Jalinkesra Penanganan Rumah Tangga Sangat Miskin melalui Program Perikanan Budidaya sebesar Rp. 9.500.000.000,-

5. Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

Program tersebut rencana alokasi anggaran sebesar Rp 1.750.000.000,- dengan rencana kegiatan :

- a. Pendidikan Kemasyarakatan sebesar Rp 1.750.000.000,-

6. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program tersebut direncanakan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 56.970.000.000,- yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan :

- a. Jalinkesra Penanganan Rumah Tangga Sangat Miskin melalui Program Perikanan Budidaya sebesar Rp 3.100.000.000,-
- b. Pengelolaan produksi perikanan budidaya sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- c. Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya sebesar Rp 23.000.000.000,-
- d. Optimalisasi UPT Perikanan Budidaya sebesar Rp. 20.000.000.000,-
- e. Pengelolaan Kesehatan Ikan Budidaya dan Lingkungan sebesar Rp 4.270.000.000,-
- f. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Payau sebesar Rp 1.000.000.000,-
- g. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Tawar sebesar Rp 600.000.000,-
- h. Pendidikan Masyarakat sebesar Rp 3.000.000.000,-

7. Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan Tangkap

Program ini direncanakan mendapatkan anggaran sebesar Rp 130.000.000.000,- yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan :

- a. Pengembangan teknologi perikanan tangkap dan operasional UPTD tangkap sebesar Rp 1.000.000.000,-
- b. Fasilitas, Eksploitasi dan Aplikasi Teknologi Perikanan Tangkap sebesar Rp 10.000.000.000,-
- c. Pengelolaan operasional pelabuhan perikanan dan PPI sebesar Rp 5.000.000.000,-
- d. Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap sebesar Rp 110.000.000.000,-
- e. Pendidikan Masyarakat bagi Nelayan sebesar Rp 4.000.000.000,-

8. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Program ini diusulkan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 18.600.000.000,- yang berisi kegiatan :

1. Jalinkesra Penanganan Rumah Tangga Sangat Miskin Melalui Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan sebesar Rp 3.100.000.000,-
2. Pengembangan Pengolahan dan Jaminan Mutu Hasil Perikanan sebesar Rp 4.000.000.000,-
3. Pengembangan Usaha Perikanan dan Kelautan sebesar Rp 3.000.000.000,-
4. Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Produk Perikanan dalam dan luar negeri sebesar Rp 3.500.000.000,-
5. Penguatan Kompetensi Pengendalian, Pengujian dan Sertifikasi Mutu Hasil Perikanan serta Pengembangan Teknologi sebesar Rp 4.000.000.000,-
6. Pendidikan kemasyarakatan produktif sebesar Rp 2.000.000.000,-

9. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan

Program tersebut alokasi dana direncanakan sebesar Rp 475.000.000,- yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan :

- a. Fasilitasi pengembangan kawasan agropolitan dibidang budidaya perikanan sebesar Rp 250.000.000,-
- b. Pembentukan dan pengembangan klaster komoditas perikanan unggulan berpotensi ekspor sebesar Rp 125.000.000,-
- c. Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia pembudidaya ikan / nelayan di kawasan agropolitan sebesar Rp 100.000.000,-

10. Program Kesejahteraan Petani

Program ini dialokasikan dana sebesar Rp 2.500.000.000,- yang digunakan untuk kegiatan Fasilitasi Program Anti kemiskinan (APP) bidang perikanan

BAB IV P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis kinerja.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2013 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan perikanan dan kelautan di Jawa Timur sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

**Surabaya, Maret 2012
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan tugas pembangunan di Propinsi Jawa Timur, khususnya mekanisme dan pelaksanaan system perencanaan pembangunan yang akuntabel di jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka bersama ini Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur membuat dokumen Rencana Kerja yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Tahun 2013.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat beberapa informasi penting berkaitan dengan hasil pelaksanaan pembangunan di bidang perikanan dan kelautan tahun 2011, serta informasi lain tentang masalah-masalah yang dihadapi, sekaligus upaya-upaya dalam mengatasi masalah yang dalam hal ini diwujudkan melalui penetapan kebijakan, program, dan strategi yang akan dilakukan pada tahun 2013.

Semoga upaya kita sekalian dapat membawa manfaat dan hasil yang lebih baik dalam menunjang pembangunan Propinsi Jawa Timur.

Surabaya, Maret 2012
**KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

Ir. KARDANI MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19541113 198103 1 012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Skpd	10
BAB. III. TUJUAN, STRATEGI DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2013..	15
3.1. Tujuan	15
3.2. Strategi Pembangunan.....	15
3.3. Indikator Kinerja Utama Tahun 2013	16
3.4. Program/Kegiatan Tahun 2013	17
BAB. V PENUTUP.....	21
LAMPIRAN MATRIKS RENJA TAHUN 2013	



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2013

**DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
PROVINSI JAWA TIMUR
2012**